

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara umum. Dalam arti yang lebih luas, kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi dimana individu dan kelompok dalam masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya, layanan, dan lingkungan yang memungkinkan mereka mencapai potensi maksimum mereka serta menikmati kehidupan yang bermakna, sehat, dan produktif. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada keberanian ekonomi, tetapi juga mencakup aspek emosional, fisik, dan, psikologis. (Patty., M.Kesos, 2021)

Undang-undanf RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai :

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, mental, maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknyambagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Pembaharuan peraturan mengenai kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan sosial terdapat pada ketentuan umum Bab I Undang-undang Kesejahteraan Sosial tahun 2009 nomor 11 :

1. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi dan bidang kegiatan menunjuk pada pada kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai profesi dan ilmu, seperti pekerjaan sosial, kedokteran, keperawatan, kependidikan (guru), psikologi, psikiatri, hukum, dll. Organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan

kesejahteraan sosial disebut lembaga kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu sub-sistem dalam kesejahteraan sosial. (Suharto, PhD., 2020)

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup individu, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesejahteraan sosial mampu untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien. Menurut Scheneiderman (1972) dalam Fahrudin (2014: 10) menyebutkan tiga tujuan. Utama dari sistem kesejahteraan sosial yaitu: “Pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem”. Dari ketiga tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Sistem.

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat.

b. Pengawasan Sistem.

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan tersebut meliputi, mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan dalam bentuk kompensasi, (re) sosialisasi, serta kemampuan untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.

c. Perubahan Sistem.

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

Secara substansial, tujuan tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kemampuan individu, keluarga, dan kelompok dalam menjalankan peran sosialnya secara optimal. Undang-undang ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai upaya terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. (Taufiqurokhman et al., 2022)

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial mengurangi dampak negatif akibat pembangunan dan menciptakan situasi situasi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah sosial baru. Di masyarakat yang sedang bertransformasi, upaya pencegahan fokus pada kegiatan yang membantu menciptakan pola hubungan sosial baru dan lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial, sehingga orang yang mengalami masalah tersebut dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Fungsi ini juga mencakup fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berperan untuk memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai kegiatan yang membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

Fungsi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki peran yang komprehensif dalam kehidupan masyarakat, mulai dari upaya pencegahan munculnya masalah sosial, penanganan dan pemulihan individu yang mengalami hambatan sosial, hingga pengembangan potensi serta dukungan terhadap sistem pelayanan sosial lainnya. Dengan demikian, kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pembangunan kapasitas individu dan masyarakat agar mampu hidup secara mandiri, berdaya, dan berfungsi sosial secara optimal. (Taufiqurokhman et al., 2022)

2.1.4 Nilai dan Prinsip Dasar dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Nilai dasar dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan pedoman etis dan filosofis yang mendasari seluruh praktik, kebijakan, dan pelayanan sosial. Nilai-

nilai ini menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

1. Nilai Kemanusiaan (*Human Dignity*)

Ilmu kesejahteraan sosial menjunjung tinggi martabat dan harga diri manusia. Setiap individu dipandang memiliki nilai yang sama tanpa diskriminasi atas dasar ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi fisik. Menurut Suharto (2009), kesejahteraan sosial berorientasi pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang berhak hidup layak.

2. Nilai Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan nilai fundamental dalam kesejahteraan sosial yang menekankan pemerataan kesempatan dan akses terhadap sumber daya sosial. Friedlander dan Apte (1982) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan melalui pelayanan sosial yang terorganisasi.

3. Nilai Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial menekankan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan negara dalam menangani masalah sosial. Nilai ini mencerminkan kepedulian sosial dan kerja sama untuk membantu kelompok rentan (Midgley, 1995).

4. Nilai Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan nilai yang menempatkan individu dan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian dan penguatan kapasitas sosial masyarakat (Suharto, 2009).

Prinsip dasar merupakan pedoman operasional dalam pelaksanaan praktik kesejahteraan sosial agar sejalan dengan nilai-nilai yang dianut.

1. Prinsip Keberfungsian Sosial

Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama kesejahteraan sosial adalah membantu individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran sosialnya secara optimal. Menurut Skidmore, Thackeray, dan Farley (1997), keberfungsian sosial menjadi indikator utama keberhasilan intervensi kesejahteraan sosial.

2. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pelayanan dan program kesejahteraan sosial. Midgley (1995) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

3. Prinsip Non-Diskriminasi

Ilmu kesejahteraan sosial menolak segala bentuk diskriminasi dan menjamin kesetaraan akses pelayanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan (Friedlander, 1980).

4. Prinsip Kemandirian

Prinsip ini menekankan bahwa pelayanan sosial harus mendorong individu dan keluarga untuk mandiri, bukan bergantung secara terus-menerus pada

bantuan sosial. Prinsip kemandirian menjadi landasan dalam program pemberdayaan sosial (Suharto, 2009).

5. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa upaya kesejahteraan sosial harus bersifat jangka panjang dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi (Midgley, 1995).

Nilai dan prinsip dasar dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan fondasi etis dan profesional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Nilai memberikan arah normatif, sedangkan prinsip berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan. (Taufiqurokhman et al., 2022)

2.2 Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah sebuah ilmu yang muncul dari perkembangan pemikiran para filantropis dan relawan. Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang menekankan fungsi sosial manusia dalam berinteraksi dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Fokus pada fungsi sosial manusia ini menjadi ciri khas pekerjaan sosial dibandingkan dengan profesi pertolongan lainnya. Profesi pekerjaan sosial terus berkembang, termasuk dalam pengertian tentang pekerja sosial itu sendiri. Berdasarkan situs (<http://www.arts.unsw.edu.au/socialwork/>), dan yang terakhir, definisi pekerjaan sosial adalah:

“The Social Work Profession (Adopted from the IFSW General Meeting in Montreal, Canada, July 2000) promote social change, problem solving in human relationships

and the empowerment and liberation of people to enhance wellbeing. Utilising theories of human behavior and social system. Social Work intervenes at the point where people interact with the environments. Principles of human right and social justice are fundamental to social work."

Pekerjaan sosial dikutip dari pertemuan Federasi Pekerja Sosial Internasional di Montreal, Kanada, bulan Juli 2000, bahwa pekerja sosial bertugas mempromosikan terciptanya perubahan sosial, menyelesaikan masalah dalam hubungan manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia guna meningkatkan kualitas hidup. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan teori-teori perilaku dan sistem sosial. Pekerjaan sosial bertindak saat seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial menjadi dasar dari pekerjaan sosial.

Definisi pekerjaan sosial juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan pekerjaan sosial profesional sebagai berikut :

Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pekerjaan sosial adalah sebuah ilmu yang fokus pada intervensi terhadap interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya (*environment*). Ilmu ini menggunakan teori perilaku manusia dan sistem sosial sebagai dasar, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pekerja sosial juga diperoleh melalui pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang diperoleh dalam praktek pertolongan atau penanganan masalah sosial. Menurut Siporin dalam Fahrudin (2014: 61) pekerja sosial adalah:

“Social work is defined as a social institutional method of helping to prevent their social problems, to restore and enhance their social functioning”

Pekerja sosial juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh lembaga sosial untuk membantu orang-orang dalam mencegah serta menyelesaikan masalah sosial mereka, serta memulihkan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berfungsi secara sosial. (Taufiqurokhman et al., 2022)

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

NASW (1982), mengemukakan empat tujuan utama dari praktik pekerjaan sosial. Selanjutnya the Council on Social Work Education (CSWE), merumuskan tujuan pekerjaan sosial yang juga sangat berhubungan erat, tetapi juga ada perbedaannya, rumusan tujuan tersebut menjadi dua tujuan utama dari praktik pekerjaan sosial. Tujuan praktikan pekerjaan sosial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kemampuan orang untuk memecahkan, menghadapi masalah serta kemampuan pengembangan dirinya. Dengan menggunakan konsep “orang di dalam lingkungannya”, sasaran praktik pekerjaan sosial pada tingkatan ini adalah “orang”.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang dapat menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan. Dengan menggunakan konsep “orang di dalam lingkungannya”, sasaran praktik

pekerjaan sosial pada tingkatan ini adalah “hubungan antara orang dengan sistem-sistem di mana mereka berinteraksi”.

3. Mengembangkan sistem-sistem yang dapat menyediakan sumber dan pelayanan bagi orang agar pelaksanaannya lebih efektif dan manusiawi. Dengan konsep “orang di dalam lingkungannya”, sasaran praktik pekerjaan sosial pada tingkatan ini adalah “sistem-sistem dimana orang-orang berinteraksi dengannya”.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. Dengan menggunakan konsep “orang di dalam lingkungannya”, sasaran praktik pekerjaan sosial pada tingkat ini adalah “sistem-sistem dimana orang-orang berinteraksi dengannya”. Perbedaannya dengan tujuan ketiga adalah pada ketersediaan sumber-sumber untuk melayani orang, dimana fokus dari tujuan keempat adalah pada peraturan dan keluasan kebijakan sosial yang mendasari sumber-sumber tersebut.

Menurut CSWE (1994) profesi pekerjaan sosial dapat dipraktikan pada bidang yang beragam dan luas. Tujuan-tujuan yang berkaitan adalah :

1. Mengembangkan, memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan keberfungsian individu-individu, keluarga, dan kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, mencegah, dan mengurangi ketegangan-ketegangan dan penggunaan sumber-sumber.
2. Perencanaan, perumusan, penerapan kebijakan-kebijakan sosial, pelayanan-pelayanan, sumber-sumber, dan program-program yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan mendukung pengembangan kapasitas manusia.

3. Mencapai kebijakan-kebijakan, pelayanan-pelayanan, dan program melalui keorganisasian atau advokasi administrasi dan tindakan sosial atau politik, untuk memberdayakan kelompok-kelompok dalam risiko dan mengembangkan keadilan sosial dan ekonomi.
4. Mengembangkan dan menguji pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pekerjaan sosial tersebut.

Berdasarkan tujuan yang dirumuskan CSWE, NASW menambahkan tujuan praktik pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelompok-kelompok dalam risiko dan meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi. (perempuan, lansia, cacat mental atau fisik, orang miskin, AIDS, kelompok agama yang tertekan).
2. Mengembangkan dan menguji pengetahuan dan keterampilan profesional. Pekerja sosial diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap dasar pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial. Termasuk tanggung jawabnya pekerja sosial untuk menilai secara objektif praktik-praktik yang dilakukannya, program-program dan pelayanan-pelayanan yang diberikannya.

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dan CSWE menegaskan peran strategis pekerja sosial dalam memperkuat keberfungsian individu sekaligus membenahi sistem sosial yang melingkupinya. Praktik pekerjaan sosial tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan individu dalam menghadapi masalah, tetapi juga pada upaya menghubungkan mereka dengan sumber daya, mengembangkan sistem pelayanan yang lebih efektif dan manusiawi, serta memperbaiki kebijakan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan. Selain

itu, pekerjaan sosial memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan kelompok rentan, pengembangan keadilan sosial dan ekonomi, serta peningkatan profesionalisme melalui pengembangan dan pengujian pengetahuan serta keterampilan. Dengan demikian, pekerjaan sosial hadir sebagai profesi yang mengintegrasikan intervensi pada tingkat individu dan sistem demi terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan. (Arif Haris, 2023)

2.2.3 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam penerapannya menggunakan berbagai metode yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan masalah klien secara tepat. Penyelesaian masalah klien bisa dilakukan dengan tepat apabila metode yang digunakan juga tepat. Dengan alasan tersebut, seorang pekerja sosial diharapkan memiliki kemampuan dalam menggunakan berbagai metode dalam pekerjaan sosial. Metode yang dapat digunakan dalam praktik pekerjaan sosial menurut para ahli berbeda-beda.

Metode yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial menurut Alfred Kadushin, dalam Dwi Heru Sukoco (1991: 79–87), menyatakan bahwa pengetahuan dalam pekerjaan sosial pada dasarnya diklasifikasikan menjadi lima tingkat. Kelima tingkatan pengetahuan tersebut dapat membantu pekerja sosial dalam proses pemberdayaan. Kelima tingkat pengetahuan tersebut adalah: Pengetahuan; Pekerjaan Sosial yang Umum; Bidang Praktik; Badan Sosial; Klien; Kontak.

Menurut Alfred Kadushin, metode-metode pekerjaan sosial dikelompokkan menjadi pengetahuan tentang metode pelayanan langsung dan pelayanan tidak

langsung. Metode pelayanan langsung meliputi: *case work*, *group work*, dan *community organization*. Sementara itu, metode pelayanan tidak langsung meliputi: penelitian dan administrasi.

Menurut Dean H. Hepworth dan Jo Ann Larsen, pengetahuan dalam pekerjaan sosial diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: Tingkah Laku Manusia di Dalam Lingkungan Sosial; Kebijakan Sosial; Metode-Metode Pekerjaan Sosial; dan Penelitian. Metode-metode pekerjaan sosial berkaitan dengan pengetahuan yang menjelaskan tentang fungsi sosial klien; proses pemecahan masalah; pemahaman terhadap permasalahan manusia; penggalan serta pemanfaatan sistem sumber; peran pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah; *interview*, negosiasi, dan interaksi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelitian terpisah dari pengelompokan metode pekerjaan sosial. Hal yang paling penting dalam hasil penelitian adalah manfaat dari penelitian bagi pengembangan pengetahuan profesi pekerjaan sosial.

Menurut pendapat Isbandi Rukminto Adi (2001: 35-36), intervensi mikro lebih menekankan pada dua metode utama dalam dunia pekerjaan sosial, yaitu metode Bimbingan Sosial Persorangan dan Bimbingan Sosial Kelompok, sedangkan intervensi makro memiliki variasi yang lebih luas. W.A. Friedlander (1976) membagi metode pekerjaan sosial menjadi dua kategori, yaitu metode pokok (*social case work*, *social group work*, dan *community organization*), serta metode penunjang atau teknik-teknik tidak langsung (administrasi kesejahteraan sosial dan penelitian pekerjaan sosial). Menurut Charles Zastrow (1982), pengetahuan dalam pekerjaan sosial dibagi menjadi empat kategori, yaitu: pengetahuan umum/general

(pelayanan sosial dan kebijakan sosial; tingkah laku manusia dan lingkungan sosial); pengetahuan yang berkaitan dengan bidang praktik khusus (teori permasalahan emosional; faktor hereditas dan pembelajaran sosial; penggunaan dan diagnosis gangguan emosional serta lainnya); pengetahuan yang berkaitan dengan badan sosial khusus (misalnya yang berkaitan dengan pusat kesehatan mental: persyaratan bagi klien dalam menerima pelayanan: prosedur; pembayaran dan sebagainya); serta pengetahuan yang berkaitan dengan klien (menginformasikan secara rinci tentang: keunikan klien dan masalahnya; latar belakang klien; faktor-faktor yang memengaruhi masalah klien serta sebagainya).

Metode yang tepat sangat membantu seorang pekerja sosial dalam melakukan intervensi. Metode adalah teknik dan alat yang digunakan untuk mengetahui sesuatu secara sistematis demi mencapai tujuan tertentu. Howard Goldstein mendefinisikan metode sebagai kumpulan prosedur-prosedur yang disusun secara teratur.

Tulisan ini menjelaskan tentang metode pekerjaan sosial yang dikelompokkan menjadi metode pelayanan langsung/utama/pokok dan metode pelayanan tidak langsung/metode penunjang. Hal tersebut sesuai dan didasarkan pada pendapat W.A. Friedlander dan Zastrow. Metode-metode pekerjaan sosial mencakup pengetahuan yang meliputi: strategi-strategi intervensi dalam *casework*, *group work*, dan *community organization*; serta penelitian dan administrasi.

2.2.3.1 Case Work

Menurut Rex A. Skidmore (1976), case work adalah proses yang membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Tujuan case work

adalah meningkatkan, memperbaiki, dan memperkuat fungsi sosial agar seseorang mampu membantu diri sendiri dengan cara yang terorganisir. Para ahli seperti Robert L. Barker dan Helen H. Perman dalam karya Hudri (1994: 58-59) mendefinisikan metode pekerjaan sosial dengan perorangan sebagai orientasi nilai dan bentuk praktik yang digunakan pekerja sosial. Konsep psikososial, tingkah laku manusia, dan sistem-sistem diubah menjadi keterampilan yang bertujuan membantu individu dan keluarga dalam mengatasi masalah-masalah pribadi, antar manusia, sosial ekonomi, dan lingkungan melalui hubungan tatap muka. Menurut Helen H. Periman, metode pekerjaan sosial dengan perorangan adalah proses yang digunakan oleh organisasi sosial untuk membantu individu agar bisa menyelesaikan masalah sosial secara lebih efektif. Pekerja sosial dalam menggunakan case work perlu menerapkan beberapa teknik. Berikut adalah teknik dasar dalam metode pekerjaan sosial dengan perorangan:

1. *Manipulation of environment* (memanipulasi lingkungan)
2. *Supportive relationship* (pembentukan relasi yang bersifat mendukung)
3. *Clarification of the problem* (penjelasan masalah)
4. *Interpretation* (interpretasi)

Komponen dalam *case work* terdiri dari: *person, problem, process dan place*, berikut adalah bahasan dari komponen dalam *case work*.

1. *Person* (seseorang yang memerlukan pertolongan bantuan dalam memecahkan permasalahan kehidupan sosial dan telah melakukan kontrak kerja dari pekerja sosial)

2. *Problem* (masalah yang diklasifikasikan pada masalah: pribadi, lingkungan dan krisis/Dorothy F. Beck)
3. *Place* (tempat atau badan sosial)
4. *Process* (proses merupakan serangkaian usaha dalam pemecahan masalah yang lebih bersifat individual. Menurut Max Siporin ada lima tahapan yaitu: *EIC/Engagement, Intake Contract; Assessment; Planning; Intervention; serta Evaluation and Termination*)

Kerangka praktik case work dalam penerapannya dapat dilihat dari: Tujuan (memecahkan masalah klien di dalam lingkungannya, munculkan potensi, dan meningkatkan kapasitas klien); Asumsi nilai (harga diri dan martabat, keunikan individu, serta kemandirian); Prinsip-prinsip *case work* (individualisasi, ekspresi perasaan yang bertujuan, keterlibatan emosional terkontrol, penerimaan, sikap non-judgmental, kebebasan menentukan pilihan, dan kerahasiaan/Piccard: 1979).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Felix P. Biestek (1957) dalam Johnson (1983): metode (melakukan kontak, membantu klien, dan melibatkan klien dalam pemecahan masalah), serta teknik (dalam fase awal proses case work, teknik seperti hubungan, dukungan, penjelasan, klarifikasi, saran, penjelasan, berbincang santai, dan pengeluaran perasaan). Teknik wawancara (dalam fase awal, teknik seperti setting, privasi, dan hubungan). Dasar pengetahuan (psikologi, dinamika kepribadian, struktur dan fungsi, psikologi, teori perubahan perilaku, dan teori sistem).

2.2.3.2 Group Work

Kata "manusia" berasal dari kata "socius" yang berarti teman, hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan teman dan hidup dalam kelompok. Manusia tidak bisa hidup sendirian, dan kehidupan manusia selalu terkait dengan orang lain.

Menurut Malcolm Payne (2016:xxi), group work adalah pendekatan dalam pekerjaan sosial yang menggunakan dinamika dalam kelompok sebagai cara bantuan bagi anggota kelompok. Selanjutnya, menurut Robert L. Barker seperti yang disampaikan oleh Hudri (1994:59), *social group work* adalah pendekatan dan metode dalam pekerjaan sosial di mana sekelompok kecil orang yang memiliki minat atau masalah yang sama berkumpul secara rutin dan berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama.

Lima tahapan dalam proses pekerjaan sosial menurut Max Siporin yaitu: *EIC/Engagement; Intake Contract; Assessment; Planning; Intervention; serta Evaluation Termination*. Melalui kegiatan kelompok atau keterlibatan seseorang dalam kelompok, diharapkan bisa tercapai pertumbuhan emosional, intelektual, maupun sosial seseorang secara maksimal. Berdasarkan beberapa definisi yang sudah dijelaskan, seorang pekerja sosial menggunakan kelompok sebagai alat untuk membantu individu-individu dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka melalui keanggotaan dalam kelompok.

Kerangka praktik kerja kelompok dibuat agar pekerja sosial bisa melihat pekerjaannya secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu: *Setting Praktik* (digunakan di berbagai lingkungan atau lembaga sosial, tanpa dipengaruhi

oleh jenis settingnya); Fokus (pekerja sosial memberikan layanan, memperhatikan proses kelompok serta kemampuan anggota kelompok dalam menjalankan perannya); Tujuan (mengadakan pertukaran informasi, mengembangkan keterampilan sosial, mengubah nilai-nilai individu serta mengubah perilaku anti sosial dengan cara yang produktif, seperti yang dikemukakan oleh Robert L. Barker pada tahun 1987).

Menurut Albert S. Alisi (1980) tujuan group work untuk: perbaikan, pencegahan, pertumbuhan sosial secara norma, peningkatan kemampuan kepribadian, peningkatan tanggung jawab sosial dan partisipasi warga masyarakat; dasar pengetahuan yang diperlukan adalah dari teori: kepribadian, kelompok, sosial budaya; pengetahuan tentang sistem kesejahteraan sosial, media program, dan pengetahuan tentang praktik. Tipe kelompok dapat berupa: *Social Conversation, Recreation Skill, Education, Problem Solving and Decision Making, Self Help, Socialization, Therapeutic, Sensitivity*.

Prinsip-prinsip dalam *group work* adalah: penerimaan, relasi, kesempatan dan dukungan, batasan perilaku, memimpin, meringankan, interpretasi, observasi, perencanaan dan persiapan; asumsi nilai dalam *group work* adalah: keyakinan pada martabat manusia, tanggung jawab sosial semua orang terhadap sesama, cinta kasih, penghargaan dan perhatian terhadap orang lain, memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber).

2.2.3.3 Community Organization

Istilah yang digunakan oleh para pakar untuk menyebut *community organization* berbeda-beda. Menurut Jim Ife, istilah *community organization*

digunakan sebagai *community development*, dan dalam tulisan biasanya disingkat menjadi CO/CD. Berikut penjelasan secara umum mengenai metode CO/CD.

Menurut Jim Ife (2002:3), *community development* adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusatnya, serta layanan yang berbasis masyarakat dalam konteks yang lebih luas, sebagai bagian dari upaya pengembangan masyarakat. Istilah ini kini dipandang sebagai proses pembentukan ulang struktur masyarakat manusia, yang memungkinkan cara baru dalam menghubungkan dan mengorganisasi kehidupan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, upaya manusia dianggap sebagai kegiatan atau praktik yang bertujuan memfasilitasi proses pengembangan masyarakat tersebut. Layanan berbasis masyarakat dianggap sebagai bentuk struktur dan proses yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan menggerakkan sumber daya, keahlian, dan kearifan yang ada di dalam komunitas itu sendiri.

Pengembangan masyarakat atau yang disebut *community work* adalah salah satu cara dalam pekerjaan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Metode ini juga memperhatikan prinsip partisipasi sosial, yaitu masyarakat terlibat aktif dalam prosesnya (Edi Suharto, 2002). Menurut Johnson (1984), *community work* adalah bagian dari pekerjaan sosial yang bersifat makro, yaitu fokus pada perubahan skala besar.

Langkah-langkah dalam melakukan pengembangan masyarakat atau organisasi, seperti yang dijelaskan oleh Ellen Netting (2004), terdiri dari beberapa

tahap, yaitu: mengidentifikasi masalah dan kelompok yang menjadi sasaran, menganalisis masalah tersebut, serta mengembangkan hipotesis intervensi.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, menurut Dubois (1997), terdapat tiga tahap utama, yaitu *dialogue*, *discovery*, dan *development*. Tahap *dialogue* adalah persiapan sosial, tahap *discovery* adalah proses mengenali dan merencanakan serta mengevaluasi, sedangkan tahap *development* adalah proses pengembangan melalui pembelajaran.

Selain itu, menurut Pedoman Praktikum III STKS Bandung, kegiatan dalam intervensi makro untuk pengembangan masyarakat mencakup beberapa aspek, seperti inisiasi sosial, pengorganisasian masyarakat, asesmen sosial, perencanaan sosial, intervensi sosial, evaluasi, terminasi, dan rujukan.

Beberapa istilah yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan *community organization* adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sosial dan intervensi makro. Kesejahteraan sosial secara luas mencakup berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, dalam berbagai aspek seperti ekonomi, fisik, sosial, mental, dan spiritual.

Menurut Adi (1995: 5-6), kesejahteraan sosial dapat dibandingkan dengan kesehatan jiwa, sehingga dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu: sebagai suatu kondisi, ilmu, kegiatan, dan gerakan. Pembangunan sosial dijelaskan oleh Midgley dan Conley, dalam buku Malcom Payne (2016: 178-180), menyebutkan bahwa perkembangan pemikiran modern tentang pekerjaan sosial makro, intervensi komunitas, dan pembangunan sosial mengandung prinsip dan metode praktik yang sudah digunakan di negara asal. Teori pembangunan sosial dianggap sebagai bentuk

aktivisme. Namun demikian, teori anti opresif, kritis, dan pemberdayaan dianggap idealistis dan tidak mampu menciptakan perubahan sosial. Dilihat dari sudut pandang Miglay dan Conlay, pembangunan sosial adalah bentuk perubahan sosial yang progresif, yang menggabungkan hak-hak manusia, perdamaian, dan keadilan sosial.

Community work adalah proses membantu masyarakat untuk meningkatkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Dilihat dari strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurut Midgley (1995) terdapat tiga strategi pembangunan sosial: Pembangunan Sosial melalui Individu; Pembangunan Sosial melalui Komunitas; dan Pembangunan Sosial melalui Pemerintah.

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat merupakan dasar penting yang harus dipahami dan dihayati oleh seorang pekerja sosial. Prinsip tersebut perlu menjadi bagian dari kepribadian seorang pekerja sosial. Menurut Ife (2002), prinsip-prinsip pengembangan masyarakat meliputi: Prinsip Ekologis, yaitu holisme, berkelanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, serta perkembangan yang seimbang. Prinsip Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia, yaitu mengatasi struktur yang merugikan, mengatasi wacana yang merugikan, pemberdayaan, Hak Asasi Manusia, serta definisi kebutuhan. Prinsip Menghargai yang Lokal, yaitu menghargai pengetahuan lokal, budaya lokal, sumber daya lokal, keterampilan masyarakat lokal, proses lokal, dan partisipasi. Prinsip Proses, yaitu proses hasil dan visi, integritas proses, menumbuhkan kesadaran, kerja sama dan konsensus, langkah pembangunan perdamaian dan anti kekerasan, inklusivitas,

serta membangun masyarakat. Prinsip Global dan Lokal, yaitu menghubungkan hal-hal global dan lokal serta praktik anti kolonialis.

Menurut Jack Rothman dan Tropman, intervensi makro mencakup model intervensi: *Locality Development* (Pengembangan Masyarakat); *Social Planning* (Perencanaan Sosial); *Social Action* (Aksi Sosial). Pengertian komunitas juga dapat merujuk pada komunitas fungsional, yaitu kelompok orang yang dibentuk karena memiliki pekerjaan atau bidang tugas yang sama, bukan hanya karena mereka tinggal di wilayah yang sama. Dalam hal ini, komunitas fungsional berhubungan dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan pada tingkat komunitas itu sendiri.

Rothman menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui intervensi komunitas dapat dilakukan dengan beberapa model atau pendekatan, seperti pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Dari ketiga pendekatan tersebut, pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu melalui pendekatan konsensus pada pengembangan masyarakat lokal, pendekatan kepatuhan pada perencanaan sosial, dan pendekatan konflik pada aksi sosial.

Keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki dalam *community organization* adalah: berkomunikasi secara pribadi dan kelompok, membangun serta mendidik masyarakat, merencanakan dan mengatur proses penggalan sumber daya masyarakat, menulis, memotivasi, memberi semangat serta menggerakkan aktivitas, menengahi konflik, bernegosiasi, memediasi, merepresentasikan, beradvokasi, mempresentasikan kepentingan masyarakat, bekerja dengan media, mengelola dan mengorganisasi, serta melakukan penelitian. Teknik-teknik dalam *community*

organization menurut Barger dan Holloway adalah: Kolaborasi; Kampanye; Kontes. Peranan Pekerja Sosial dalam *community organization* menurut Jim Ife dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu: Peranan Fasilitatif; Peranan Edukasional; Peranan Representatif dan Peranan Teknikal. (Arif Haris, 2023)

2.2.4 Peran Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial memainkan peran penting dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat agar bisa menjalankan fungsi sosialnya dan mencapai kesejahteraan. Menurut Zastrow (2010), pekerja sosial bertindak sebagai agen perubahan yang membantu klien mengatasi hambatan dalam kehidupannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, baik yang ada di dalam diri klien sendiri maupun dari luar. Pekerja sosial harus mampu menyesuaikan perannya sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi klien. Zastrow (dalam bukunya *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*, 2010) menjelaskan bahwa pekerja sosial memiliki beberapa peran utama, yaitu:

1. *Enabler* (Pemberdaya)

Pekerja sosial membantu klien dalam mengenali masalah, mengembangkan kemampuan, serta menemukan potensi diri untuk menghadapi kesulitan yang dialami. Dalam peran ini, pekerja sosial berusaha memperkuat kemampuan individu agar bisa membuat keputusan sendiri dan meningkatkan rasa percaya dirinya (Zastrow, 2010).

2. *Broker* (Penghubung)

Pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara klien dan organisasi atau sumber daya sosial yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Pekerja sosial

membantu klien mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, atau bantuan sosial lainnya yang sesuai (Zastrow & Kirst-Ashman, 2013).

3. *Advocate* (Advokat/Pembela)

Dalam peran ini, pekerja sosial memperjuangkan hak klien, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan, agar mendapatkan akses yang adil terhadap layanan sosial dan keadilan. Pekerja sosial bertindak sebagai pembela ketika sistem atau kebijakan yang ada tidak adil (Zastrow, 2010).

4. *Counselor* (Konselor)

Sebagai konselor, pekerja sosial memberikan bimbingan, dukungan emosional, serta bantuan dalam proses penyelesaian masalah pribadi dan sosial. Tujuannya adalah agar klien bisa memahami dirinya sendiri dan mengembangkan keterampilan untuk menghadapi masalah secara lebih adaptif (Zastrow & Kirst-Ashman, 2013).

5. *Mediator* (Penengah)

Pekerja sosial juga bertindak sebagai penengah dalam konflik yang terjadi antara individu, kelompok, atau lembaga. Dalam menjalankan peran ini, pekerja sosial mencoba membangun komunikasi yang efektif agar semua pihak bisa mencapai kesepakatan yang adil (Zastrow, 2010).

6. *Educator* (Pendidik)

Sebagai pendidik, pekerja sosial memberikan pelatihan, penyuluhan, atau informasi yang dibutuhkan oleh klien. Tujuannya adalah agar klien memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam berinteraksi di masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya (Zastrow, 2010).

7. *Coordinator* (Koordinator)

Dalam peran sebagai koordinator, pekerja sosial mengatur berbagai layanan sosial agar bantuan yang diberikan kepada klien bisa lebih terpadu dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan layanan tidak saling tumpang tindih, serta semua kebutuhan klien dapat terpenuhi secara lengkap (Zastrow & Kirst-Ashman, 2013).

8. *Researcher* (Peneliti)

Saat berperan sebagai peneliti, pekerja sosial melakukan penelitian ilmiah untuk memahami masalah sosial dan mengevaluasi keberhasilan program intervensi sosial. Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan praktik sosial yang lebih baik (Zastrow, 2010).

9. *Social Activist* (Aktivis Sosial)

Pekerja sosial juga berperan dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan publik yang lebih adil. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi, kampanye, dan gerakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Zastrow & Kirst-Ashman, 2013).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang sangat beragam—mulai dari membantu orang lain hingga menjadi agen perubahan sosial. Peran-peran ini menjadi dasar penting dalam praktik pekerjaan sosial yang bertujuan meningkatkan fungsi sosial dan kesejahteraan manusia.

2.3 Program Keluarga Harapan

2.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan uang berupa dana langsung kepada keluarga yang sangat miskin yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah tingkah laku peserta PKH yang kurang baik, dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus tujuan PKH adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan KSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KSM

Dengan tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Syarat untuk menjadi peserta PKH adalah keluarga yang sangat miskin yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai Peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Komponen PKH terdiri dari :

1. Ibu Hamil/Nifas
2. Anak usia di bawah lima tahun (Balita)
3. Anak usia pra sekolah
4. Anak SD dan yang sederajat

5. Anak SMP dan yang sederajat
6. Anak SMA dan yang sederajat
7. Anak Penyandang disabilitas

2.3.2 Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Pekerjaan Sosial

Dalam perspektif pekerjaan sosial, PKH bukan sekadar bantuan finansial, tetapi merupakan bentuk intervensi sosial yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan tujuan pekerjaan sosial, yaitu membantu individu, keluarga, dan masyarakat meningkatkan keberfungsian sosialnya, dengan kata lain pekerja sosial berperan sebagai pendamping PKH.

Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman dan kebijakan program yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, pendamping juga dituntut untuk aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti aparat kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pendidikan dan kesehatan guna memastikan kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, pendamping perlu menjalin koordinasi yang baik dengan koordinator PKH di tingkat kabupaten/kota serta bekerja sama dengan sesama pendamping di wilayahnya agar tercipta sinergi dalam pelaksanaan tugas.

Lebih lanjut, pendamping PKH juga berperan dalam membangun kemitraan dengan berbagai unsur di luar program, termasuk lembaga dan kelompok berbasis masyarakat, sebagai upaya mendukung pengembangan serta pemberdayaan keluarga peserta PKH. Dalam praktiknya, pendamping melakukan pendampingan

secara langsung kepada peserta PKH dengan memastikan bahwa mereka memenuhi komitmen, khususnya dalam kehadiran pada layanan pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pendamping memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi kepada peserta PKH agar mereka dapat memperoleh hak-haknya, baik sebagai penerima manfaat PKH maupun dalam mengakses program-program komplementer, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), bantuan beras miskin (RASKIN), serta program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Rumah Tinggal Layak Huni. Pada akhirnya, pendamping PKH juga bertanggung jawab terhadap pencapaian target serta kualitas pelaksanaan program di wilayah kerjanya, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat tercapai secara optimal.

2.4 Teori Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah segala upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan pendapatan atau konsumsi kepada orang yang miskin, melindungi kelompok yang rentan terhadap risiko dalam menghidupi diri, serta meningkatkan kesejahteraan dan hak sosial bagi kelompok yang terabaikan dalam masyarakat. (Suharto, 2020)

Perlindungan sosial merupakan bagian penting dari kebijakan publik yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesulitan yang dialami oleh kelompok-kelompok yang lemah dan kurang beruntung secara multidimensi.

Sebagai kebijakan publik, perlindungan sosial adalah jenis kebijakan sosial yang mencakup berbagai bentuk layanan, aturan, atau program yang dibuat pemerintah untuk melindungi rakyatnya, khususnya kelompok yang rentan dan kurang beruntung, dari berbagai risiko ekonomi, sosial, dan politik yang terus-menerus mengancam kehidupan mereka. Selain kebijakan resmi yang dibuat pemerintah, pengertian perlindungan sosial juga mencakup cara-cara tidak resmi, seperti arisan, sistem bantuan bersama dalam masyarakat, bantuan dari keluarga atau teman, serta berbagai bentuk jaring pengaman sosial yang dibuat oleh masyarakat sendiri (community-based safety nets) lainnya. (Suharto, 2020)

Kebijakan dan program perlindungan sosial, terutama di Indonesia, terdiri dari tiga bagian yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, serta jaminan kesejahteraan sosial.

2.5 Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, rentan, atau menghadapi berbagai risiko sosial agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bantuan sosial menjadi instrumen kebijakan yang berfungsi memberikan perlindungan dasar sehingga masyarakat mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan secara bertahap meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Menurut (Suharto, 2014) bantuan sosial merupakan komponen dari sistem perlindungan sosial yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami kerentanan akibat kemiskinan, bencana, disabilitas, lanjut usia, ataupun berbagai bentuk risiko sosial lainnya. Bantuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun pelayanan sosial dengan tujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar serta mengurangi dampak dari risiko sosial yang dialami penerima manfaat. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak sosial masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, bantuan sosial mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga mereka dapat hidup secara layak, mengembangkan potensi diri, serta menjalankan fungsi sosialnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, bantuan sosial menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi maupun kerentanan sosial.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan

secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui program bantuan sosial tersebut, diharapkan penerima manfaat mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara bertahap.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan transfer berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko sosial. Risiko sosial yang dimaksud mencakup berbagai kondisi yang menyebabkan individu atau keluarga mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti kemiskinan, bencana alam, bencana sosial, krisis ekonomi, maupun keadaan lain yang tidak dapat diatasi secara mandiri.

Pada pelaksanaannya, bantuan sosial memiliki beberapa tujuan pokok. Pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menghadapi risiko sosial agar kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi. Kedua, menekan tingkat kemiskinan melalui bantuan yang dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Ketiga, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan. Keempat, mendorong

peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan lebih mandiri.

2.6 Pemenuhan Kebutuhan Dasar

2.6.1 Pengertian Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Menurut King (1971), kebutuhan dasar manusia adalah perubahan energi yang terjadi di dalam dan di luar tubuh, yang terlihat dari cara seseorang berperilaku menghadapi kondisi, peristiwa, dan orang lain. Sementara itu, menurut Roy (1980), kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan pribadi yang mendorong seseorang untuk bereaksi agar dapat menjaga keutuhan tubuhnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia memiliki sifat yang beragam. Secara umum, setiap orang memiliki kebutuhan yang sama, namun karena adanya perbedaan budaya dan kebiasaan masing-masing, kebutuhan tersebut bisa berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan prioritas yang dimiliki, jika ada kegagalan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia akan lebih berpikir dan berusaha untuk mencarinya lagi. (Hidayat & Uliyah, 2015)

2.6.2 Teori Kebutuhan Dasar

Unsur kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori Hierarki kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan

keselamatan dan keamanan, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Asmadi, 2008 dalam (Syafrinanda, 2025).

Menurut Asmadi (2008), lima kebutuhan dasar manusia adalah:

a. Kebutuhan Fisiologi (*Physiological Needs*)

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan utama yang harus terpenuhi untuk menjaga homeostasis biologis dan kelangsungan hidup setiap individu. Kebutuhan ini menjadi dasar, dan jika tidak terpenuhi, maka dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan lainnya. Kebutuhan fisiologis mencakup oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, istirahat, tidur, bebas dari rasa nyeri, pengaturan suhu tubuh, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Ketika kebutuhan fisiologis ini telah terpenuhi, maka seseorang akan mulai memenuhi kebutuhan yang lebih besar secara bertahap.

b. Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan (*Self Security Needs*)

Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan mencakup perlindungan diri terhadap berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik maupun tidak. psikososial. Ancaman terhadap keselamatan fisik dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanik, kimia, termal, atau bakteri. Kebutuhan ini berhubungan dengan aspek fisiologis dan relasi interpersonal. Dalam konteks fisiologis, keselamatan dan keamanan berkaitan dengan ancaman yang mempengaruhi tubuh dan kehidupan seseorang. Ancaman ini bisa nyata atau imajinasi, ancaman fisiologis meliputi penyakit, nyeri, dan kecemasan. Sedangkan ancaman psikologis dapat berupa penyesuaian terhadap lingkungan baru, perubahan peran, dan sebagainya.

c. Kebutuhan untuk dicintai dan mencintai orang lain (*Love and Belongingness Needs*)

Berkaitan dengan emosi seseorang. Kebutuhan ini mendorong individu untuk menjalin hubungan emosional yang berarti dengan orang lain. Dorongan ini semakin kuat, sehingga Individu berusaha keras agar bisa memenuhi rasa butuh akan cinta dan perasaan memiliki. Kebutuhan ini umumnya muncul setelah kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi. Ketika Seseorang yang merasa aman dan dilindungi memiliki waktu dan tenaga untuk mencari cinta serta perasaan memiliki. Kebutuhan Cinta dan rasa memiliki mencakup memberi serta menerima kasih sayang, mencari teman hidup, bergaul, menjalin hubungan interpersonal, memperoleh perlakuan yang lembut, merasakan kebersamaan, dan menjalin pergaulan yang intim.

d. Kebutuhan Harga Diri (*Self Esteem Needs*)

Harga diri adalah cara seseorang mengukur nilai dirinya sendiri yang diperoleh dengan mengevaluasi sejauh mana perilaku seseorang sesuai dengan citra diri yang diinginkan (Stuart & Sundeen, 1998). Menurut hierarki kebutuhan dasar manusia, kebutuhan harga diri dapat tercapai setelah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan harga diri terlihat dari sikap penghargaan diri. Kebutuhan penghargaan dan harga diri terkait dengan keinginan untuk meraih kekuatan, Pencapaian, rasa cukup, kompetensi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Kebutuhan harga diri mencakup menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dihargai oleh orang

lain, kebebasan mandiri, prestise, pengakuan, dan penghargaan. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, seseorang merasa lebih percaya diri. dan merasa berguna. Sebaliknya, jika kebutuhan penghargaan dan harga diri tidak tercapai, seseorang merasa tidak puas berdaya dan rendah diri.

e. Kebutuhan Aktualisasi diri (*Self Actualization Needs*)

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan tertinggi menurut Maslow dan Kalish. Untuk mencapai tingkat ini, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghalangi, yang secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam diri individu, seperti ketidaktahuan tentang potensi diri, serta perasaan ragu dan takut untuk mengungkapkan kemampuan yang dimiliki, sehingga potensi tersebut tetap terpendam. Berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri, ada asumsi dasar bahwa manusia pada dasarnya memiliki nilai intrinsik berupa kebaikan, yang memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan diri.

Berdasarkan unsur kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Virginia Henderson, keperawatan didefinisikan sebagai upaya untuk membantu individu, baik yang sakit maupun sehat, dalam melaksanakan aktivitas yang berkontribusi pada kesehatan dan proses penyembuhan. Individu akan mampu melaksanakan aktivitas tersebut secara mandiri apabila ia memiliki kekuatan, pemahaman, dan pengetahuan yang diperlukan. Tujuan dari keperawatan adalah untuk membantu individu mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. (Syafirinanda, 2025)

2.7 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Nama Penulis	Novia Suci Andaniyati, Rian Destiningsih, Yustirania Septiani
	Judul Articul	Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Magelang Tahun 2020
	Nama Jurnal	DINAMIC (Directory Journal of Economic)
	Tahun	2021
	Metode	Kuantitatif
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa komponen Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang tahun 2020. Akses pelayanan kesehatan, peran pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan, artinya peningkatan pada ketiga aspek tersebut diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, akses pelayanan pendidikan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana peningkatan akses pendidikan diikuti dengan penurunan kesejahteraan. Namun demikian, secara simultan akses pelayanan kesehatan, akses pelayanan pendidikan, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dan P2K2 bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang.
	URL/DOI	https://doi.org/10.31002/dinamic.v3i1.2685
2.	Nama Penulis	Arif Sofianto
	Judul Articul	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah
	Nama Jurnal	Jurnal Sosio Konsepsia
	Tahun	2020
	Metode	Kualitatif dan Kuantitatif (<i>mixed method</i>)
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat tanggapan positif dari mayoritas responden karena dinilai memudahkan, dikelola dengan baik, dan memberikan manfaat nyata terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran akibat data yang belum valid, proses top-down, serta masalah politik dan pendanaan di tingkat desa, yang memicu konflik sosial. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga belum dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukan dan belum berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Meskipun demikian, program ini tetap diharapkan berlanjut dengan perbaikan kebijakan berbasis bottom-up, pemutakhiran data yang akurat, penguatan kelembagaan, serta orientasi keberlanjutan agar masyarakat berperan sebagai subjek dalam penentuan program.
	URL/DOI	https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091
3.	Nama Penulis	Ainun Oktavia Sari, Rahayu Sulistyowati, Ita Prihantika

	Judul Artikel	Dampak Sosial Ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dalam Perspektif The Most Significant Change Technique (MSCt)
	Nama Jurnal	Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
	Tahun	2020
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pagelaran secara umum mampu mendorong perubahan positif pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya masyarakat pra sejahtera, sehingga membantu mereka keluar dari zona kemiskinan. Meskipun perubahan yang terjadi belum signifikan, dampak Program Keluarga Harapan (PKH) tetap berkontribusi positif terhadap pengentasan kemiskinan jangka panjang, yang terlihat dari adanya eks keluarga penerima yang keluar secara mandiri karena merasa telah mampu secara ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak program ini terhadap eks penerima manfaat meliputi peningkatan kondisi ekonomi dari pra sejahtera menjadi sejahtera, perbaikan kualitas kesehatan sebagai dampak tidak langsung dari peningkatan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan anak usia sekolah yang tetap terjaga meskipun keluarga telah keluar dari program.
	URL/DOI	Dampak Sosial Ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dalam Perspektif The Most Significant Change Technique (MSCt) Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
4.	Nama Penulis	Andi Agus Setyawan, Noor Latifah, Anteng Widodo
	Judul Artikel	Implementasi Sistem Pengaduan Masyarakat, Non Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Pati
	Nama Jurnal	Jurnal Prosiding SNATIF
	Tahun	2016
	Metode	Kuantitatif
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terbentuk sistem informasi untuk mengajukan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trans Nasional Kabupaten Pati. Sistem ini mampu memproses dan menampilkan hasil perhitungan secara terstruktur dalam bentuk matriks hingga menghasilkan nilai preferensi dan peringkat penerima bantuan. Hasil tersebut disajikan dalam bentuk portal yang dapat diakses oleh pengguna dari setiap desa serta pendamping di tiap kecamatan. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan bantuan Adobe Dreamweaver CS6 dan menggunakan basis data MySQL.
	URL/DOI	http://jurnal.umk.ac.id/index.php/SNA/article/view/672
5.	Nama Penulis	Nita Piana
	Judul Artikel	Efektivitas Penyerapan Dana PKH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gereneng Lombok Timur
	Nama Jurnal	Jurnal Humanitas
	Tahun	2019

	Metode	Kualitatif
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan uang tunai kepada keluarga yang berhak, yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Keluarga tersebut harus memenuhi syarat tertentu di bidang pendidikan dan kesehatan, agar kualitas manusia di Indonesia bisa meningkat. Di Desa Gereneng, pelaksanaan program berjalan lancar, karena banyak keluarga yang aktif memenuhi tugas dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil dari program ini terlihat, yaitu siswa lebih rajin belajar di sekolah dan jumlah siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan menurun. Di bidang kesehatan, masyarakat yang kurang mampu lebih peduli terhadap kesehatan ibu hamil dan anak balita, karena rutin melakukan pemeriksaan di Posyandu.
	URL/DOI	https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/
6.	Nama Penulis	Sumit Agus Tri Cahyono, Siti Wahyu Iryani
	Judul Article	Kontribusi PKH Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
	Nama Jurnal	Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
	Tahun	2019
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang sudah diterapkan sejak tahun 2012 dengan jumlah awal 745 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 1.823 KPM pada tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar 145 persen dalam waktu enam tahun, dengan rata-rata penambahan 205–206 penerima setiap tahunnya. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan kesejahteraan penerima dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta perubahan sikap dan meningkatnya kemandirian mereka. Mayoritas penerima manfaat berada di usia produktif dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, memengaruhi jenis pekerjaan yang mereka lakukan dan rendahnya penghasilan, sehingga memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) membantu memperbaiki pola konsumsi, mengurangi ketidakcukupan makanan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, meski ada perbedaan dalam penyalurannya. Faktor yang mendukung keberhasilan program ini adalah motivasi tinggi keluarga penerima serta peran aktif pendamping program. Tapi masih ada kendala seperti penghasilan keluarga yang rendah, pemanfaatan bantuan belum tepat sasaran, dan kondisi geografis yang mempersulit akses layanan. Untuk itu, diperlukan penguatan perubahan perilaku ekonomi melalui Family Development Session (FDS) serta perbaikan dalam pendataan penerima dengan verifikasi dan validasi yang melibatkan seluruh masyarakat untuk mengurangi kesalahan dalam pengelompokan keluarga.
	URL/DOI	https://doi.org/10.31105/jpks.v17i4.1608
7.	Nama Penulis	Widia Lestari, Drajat Tri Kartono, Argyo Dermatoto, Khabib Bima Setiyawan
	Judul Article	Pemberdayaan Rumah Tangga menuju Kemandirian melalui Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH)

	Nama Jurnal	Jurnal Society, FISIP Unoversitas Pembangunan Panca Budi
	Tahun	2019
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil meningkatkan kemampuan orang tua penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Sukoharjo dengan meningkatkan akses terhadap layanan publik, kualitas pendidikan dan kesehatan, dukungan sosial, kegiatan ekonomi keluarga, serta kemampuan memecahkan masalah di rumah tangga. Keberhasilan ini tergantung pada kehadiran dan pelaksanaan program yang terintegrasi, sehingga peningkatan kemandirian harus dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh potensi, terutama modal sosial masyarakat. Meningkatkan ekonomi rumah tangga adalah langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan, yang didukung oleh kebijakan dan program yang fokus pada penguatan ekonomi keluarga miskin. Modal sosial program yang mencakup kepercayaan, nilai dan norma sosial, serta saling bantu, digunakan melalui berbagai jejaring sosial seperti arisan, forum Program Keluarga Harapan (PKH), KUBE, dan koperasi, sehingga membuka akses terhadap sumber daya ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin. Dengan memaksimalkan modal sosial ini, penerima program ini memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian ekonomi dan secara perlahan keluar dari ketergantungan pada bantuan sosial (graduasi Program Keluarga Harapan).
	URL/DOI	https://doi.org/10.33019/society.v7i2.124
8.	Nama Penulis	A. Nururrochman Hidayatulloh
	Judul Articel	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat dalam Kajian Program Keluarga Harapan : Tinjauan Empirik Dampak Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Penerima Manfaat
	Nama Jurnal	Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
	Tahun	2019
	Metode	Kuantitatif
	Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan tren yang baik setelah perpindahan sistem Bretton Woods yang terkait dengan emas ke sistem uang kertas pada tahun 1971. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang Eropa berada dalam kategori yang baik, meskipun bantuan sosial-ekonomi tetap diperlukan karena masih ada kondisi kemiskinan yang menyebabkan sebagian dana dialokasikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi. Namun pembelajaran keterampilan hidup melalui Family Development Session (FDS) belum optimal dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan dan komitmen pemerintah daerah melalui penguatan koordinasi, monitoring, evaluasi, serta sharing anggaran APBD untuk layanan kesehatan, pendidikan, sarana FDS, serta program pemberdayaan ekonomi produktif. Selain itu, Dinas Sosial perlu berperan aktif sebagai leading sector dengan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan meningkatkan monitoring berbasis data yang

		akurat. Dukungan dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diperlukan melalui perbaikan akurasi data penerima, penyesuaian komponen bantuan, penguatan program komplementer, peningkatan kualitas dan jumlah pendamping, serta optimalisasi pelaksanaan FDS untuk mendorong kemandirian dan kesiapan graduasi penerima program. Di sisi lain, komitmen bank penyalur juga dibutuhkan untuk menjamin ketepatan waktu pencairan bantuan dan kemudahan penggantian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
	URL/DOI	https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2142/1039
9.	Nama Penulis	Risda Rizkillah, Megawati Simanjuntak
	Judul Artikel	Allocation of Expenditure of Poor Family as a Recipient of Program Keluarga Harapan (PKH)
	Nama Jurnal	Journal of Family Sciences
	Tahun	2018
	Metode	Kuantitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan alasan keluarga mendapat dana PKH karena adanya anak usia sekolah, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Dana PKH dihabiskan oleh keluarga dengan kisaran rata-rata waktu dua minggu. Manfaat yang sangat dirasakan oleh penerima PKH adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatnya jumlah tabungan keluarga, dan pendapatan total keluarga. Alokasi dana PKH lebih dari separuhnya digunakan untuk investasi manusia dan sepertinganya untuk kegiatan konsumtif. Namun dalam pengalokasian dana PKH masih ada keluarga yang menggunakan dana PKH untuk kegiatan non-pendidikan seperti kebutuhan makanan/kebutuhan dapur, membayar utang, tabungan, membayar listrik, dan modal usaha.
	URL/DOI	https://doi.org/10.29244/jfs.3.1.41-52
10.	Nama Penulis	Lisa Ardianto, Dewi Manda Angraini
	Judul Artikel	Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Nagari Tanjung Beringin Selatan Kabupaten Pasaman
	Nama Jurnal	JIESA : Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
	Tahun	2024
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan mengenai analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kesejahteraan masyarakat di Nagari Tanjung Beringin Selatan, yang mencakup hal-hal berikut: 1) Program Keluarga Harapan telah berhasil dijalankan di Nagari Tanjung Beringin Selatan, dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan melalui validasi dan pemutakhiran data, dengan mendatangi rumah warga untuk verifikasi, mengadakan pertemuan kelompok, berkoordinasi dengan walnag, camat, pemangku kepentingan, dan bank pencairan dana, serta memberikan laporan bulanan untuk memastikan kelancaran operasional program. 2) Karena besarnya bantuan yang diberikan oleh PKH, masyarakat penerima KPM dan PKH dapat dianggap sejahtera dari segi pendidikan, memiliki kemampuan finansial
	URL/DOI	

		untuk menyekolahkan anak hingga SMA, dan dari segi kesehatan, memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan anak kecil dan ibu hamil. 3) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasakan adanya peningkatan terhadap taraf hidup mereka melalui Program Bantuan Bersyarat (PKH). Meningkatnya kualitas hidup mereka yang diukur dari segi pendapatan.
	URL/DOI	https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i5.479

2.8 Kerangka Pemikiran

